

ASPEK YURIDIS MENGENAI *PRODUCT LIABILITY* MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA-TURKI)

Siti Nurbaiti¹

ABSTRAK

Product liability adalah suatu tanggung jawab hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacturer*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assemble*) atau orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut. Bagaimanakah tanggung jawab produk, sistem tanggung jawab dan proses penyelesaian ganti rugi di Indonesia dibandingkan dengan di Turki menjadi pokok permasalahan yang dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dan persamaan tanggung jawab produsen, sistem tanggung jawab yang dipergunakan dan proses penyelesaian ganti ruginya. Tanggung Jawab *Product Liability* dalam UUPK Indonesia diatur secara umum dalam Bab VI dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, kepada pelaku usaha terhadap semua barang, sedangkan di Turki diatur dalam Pasal 4 The Act No. 4077 on Consumer Protection as Amended by Act No.4822. System tanggung jawab yang dipergunakan dalam UUPK menggunakan system based on fault dengan beban pembuktian terbalik untuk semua barang, sedangkan dalam The Consumer Protection Act Turki menggunakan system tanggung jawab based on fault, hanya khusus untuk produk yang cacat dan kekurangan dalam memberikan pelayanan. Di Indonesia, proses penyelesaian ganti ruginya, dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Di luar pengadilan dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sedangkan di Turki dapat dilakukan melalui pengadilan dan juga di luar pengadilan melalui lembaga Arbitrase yang dikenal dengan Arbitration Committee. Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen, Indonesia maupun Turki sama-sama membentuk suatu Badan. Di Indonesia dinamakan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, sedangkan di Turki dinamakan The Consumer Council.

Kata Kunci: *Product Liability*, Indonesia-Turki

¹ Dosen Biasa Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Email: nurbaiti_05092000@yahoo.com

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan/atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya. Dengan diversifikasi produk yang sedemikian luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi, dimana terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari produk domestik maupun yang berasal dari luar negeri.

Kondisi seperti ini, pada satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Namun, kondisi dan fenomena tersebut, pada sisi lainnya dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak

seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen². Hal tersebut bukanlah gejala regional saja, tetapi menjadi permasalahan yang melanda seluruh konsumen di dunia, termasuk negara berkembang seperti Indonesia dan India, Konsumen dihadapkan tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu, yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman digunakan/dimakan, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai (*reasonable*). Pemerintah menyadari bahwa diperlukan undang-undang serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi berjalannya peraturan tersebut dengan baik. Sedangkan konsumen harus sadar akan hak-haknya sebagai seorang konsumen, sehingga dapat melakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah³.

² Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal.12.

³ Imran Nating, *Perlindungan Konsumen dengan Product Liability*, Solusi hukum .com (8 Oktober 2008), hal.1.

Guidelines for Consumer Protection of 1985, yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan: "Konsumen dimanapun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar sosialnya". Yang dimaksud dengan hak-hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur; hak untuk mendapatkan ganti rugi; hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia (cukup pangan dan papan); hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan; dan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar. PBB menghimbau seluruh anggotanya untuk memberlakukan hak-hak konsumen tersebut di negaranya masing-masing⁴. Adanya kesadaran untuk memberikan perlindungan kepada konsumen ini telah melahirkan hukum perlindungan konsumen atau dikenal juga dengan hukum konsumen (*consumer law*). Sesuai dengan himbauan PBB, Indonesia dan Turki juga telah memberlakukan perlindungan konsumen dalam undang-undang mereka.

Indonesia mengatur masalah perlindungan konsumen dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK), yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999, sedangkan Turki diatur dalam *The Act No. 4077 on*

Consumer Protection as Amended by Act No.4822. Adapun tujuan utama dari berlakunya kedua Undang-undang tersebut adalah untuk menciptakan sistem perlindungan hukum bagi konsumen dari praktek usaha dari pelaku usaha yang menipu dan menyesatkan pemberian hak-hak dasar konsumen.

Kehadiran hukum Perlindungan Konsumen, baik di Indonesia maupun di Turki memang suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, mengingat saat ini begitu mudah lalu lintas barang dan jasa yang masuk dari berbagai negara berkaitan dengan adanya perdagangan bebas, khususnya perdagangan bebas dikawasan Asean dan Turki.

Salah satu hak dasar konsumen adalah hak untuk mendapatkan ganti rugi terhadap pelaku usaha yang menjual produk yang cacat. Produk yang cacat adalah:

"Setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan orang"⁵.

Berdasarkan batasan tersebut dapat diketahui bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah produsen pembuat produk

⁴ Tini Hadad, dalam AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Diadit Media, 2001), hal.7.

⁵ AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Diadit Media, 2001), hal.248

tersebut. Perkembangan ini dipicu oleh tujuan yang ingin dicapai doktrin, yaitu:

1. menekan lebih rendah tingkat kecelakaan karena produk cacat tersebut;
2. menyediakan sarana hukum ganti rugi bagi korban produk cacat yang tidak dapat dihindari.

Sesuatu produk disebut cacat atau tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya karena⁶:

1. Cacat produk atau Manufaktur
Keadaan produk yang pada umumnya berada dibawah tingkat harapan konsumen, atau
2. Cacat Desain
Cacat yang sedemikian rupa sehingga dapat membahayakan harta benda, kesehatan tubuh atau jiwa konsumen
3. Cacat Peringatan atau Cacat Instruksi
Cacat produk karena tidak dilengkapi dengan peringatan-peringatan tertentu atau instruksi penggunaan tertentu. Produk yang tidak memuat peringatan atau instruksi tertentu termasuk cacat produk yang tanggung jawabnya secara tegas dibebankan kepada produsen dari produk tersebut. Tetapi disamping produsen, dengan syarat-syarat tertentu, beban tanggung jawab

itu dapat pula diletakkan pada pelaku usaha lainnya, seperti importir produk, distributor atau pedagang pengecemnya.

Tanggung jawab produsen atas produk cacat tidak sama dengan tanggung jawab pelaku usaha produk pada umumnya. Tanggung jawab atas produk cacat terletak pada tanggung jawab cacatnya produk, yang berakibat pada orang atau barang orang lain, sedangkan tanggung jawab pelaku usaha, karena perbuatan melawan hukum, adalah tanggung jawab atas rusaknya atau tidak berfungsinya produk itu sendiri⁷. Selama ini, berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku, baik di Indonesia maupun Turki, pihak konsumen yang menderita kerugian akibat produk yang cacat dapat menuntut pihak produsen secara langsung atau menuntut pihak pedagang darimana barang tersebut dibeli. Tuntutan diajukan berdasarkan telah terjadinya perbuatan melawan hukum, yang dalam hukum perdata di Indonesia diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata⁸ dan Pasal 1865 KUPerdata⁹, sedangkan di Turki diatur dalam *The Law of Tort*, kepada pihak produsen atau pihak lain yang berkaitan dengan proses produksi atau penyebaran produk atau barang yang cacat tersebut. Akan tetapi, apabila seorang

⁶ Ibid, hal. 249.

⁷ Ibid, hal. 250.

⁸ Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

⁹ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

konsumen yang menderita kerugian, akan menuntut pihak produsen, (termasuk pedagang eceran, grosir, distributor, agen), maka pihak korban akan menghadapi kendala yang akan menyulitkannya untuk memperoleh ganti rugi. Hal ini disebabkan karena¹⁰:

1. Tuntutan berdasarkan atas perbuatan melawan hukum atau berdasarkan atas kesalahan (*based on fault liability system*), dimana pihak penggugat atau korban sebagai konsumen harus membuktikan adanya unsur kesalahan dari pihak tergugat atau produsen. Apabila penggugat gagal membuktikan adanya unsur kesalahan dari pihak tergugat, maka gugataannya gagal. Padahal bagi konsumen yang pada umumnya awam terhadap proses produksi dalam suatu industri, apalagi yang menggunakan teknologi canggih, dapat dikatakan mustahil mampu membuktikan secara tepat dimana letaknya kesalahan yang menyebabkan cacatnya produk tersebut;
2. Tuntutan harus dilakukan melalui pengadilan, yang biasanya memakan waktu lama, apalagi jika para pihak menempuh upaya hukum yang tersedia, banding, kasasi atau peninjauan kembali;
3. Tuntutan melalui pengadilan juga memerlukan biaya yang cukup besar

)biaya persidangan, pengacara, tenaga ahli dan sebagainya).

Untuk mengatasi kesulitan tersebut, diperkenalkan konsep hukum *produk liability* dengan *strict liability sistem*, yaitu prinsip dimana setiap orang atau konsumen yang merasa dirugikan akibat produk atau barang yang cacat dapat menuntut ganti rugi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan dipihak produsen.¹¹ Hukum tentang *product liability* ini termasuk dalam perbuatan melanggar hukum dan secara umum tanggung jawab produk (*product liability*) adalah suatu konsepsi hukum yang intinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsepsi *product liability* ini meletakkan beban tanggung jawab pembuktian produk kepada produsen.

Ketentuan mengenai *product liability* yang dapat menimbulkan kerugian atau membahayakan konsumen di Indonesia diatur dalam Pasal 4,5,7-17, 19-21 dan 21-28 dalam UUPK, sedangkan dalam *the Consumer Protection Turki*, *product liability* diatur dalam Bab II Pasal 4 sampai dan 4A. Apakah ada persamaan atau perbedaan antara pengaturan *product liability*, khususnya mengenai masalah tanggung jawab, sistem tanggung jawab maupun prosedur ganti ruginya yang diatur dalam UUPK dengan *the Consumer Pro-*

¹⁰ E. Saefullah, *Product Liability, Tanggung Jawab Produsen di Era Perdagangan Bebas*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 5 (Jakarta, 1998), hal. 38.

¹¹ *Ibid*.

tection, itulah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini dan mengangkatnya dalam penelitian yang berjudul: “Aspek Yuridis mengenai *Product Liability* menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi Perbandingan Indonesia- Turki)”.

B. Perumusan Masalah

Identifikasikan beberapa permasalahan tersebut dibuat dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah **tanggung jawab** produsen terhadap produk (*product liability*) menurut ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia dibandingkan dengan Hukum perlindungan Konsumen di Turki?;
2. Bagaimanakah **Sistem** tanggung jawab *product liability* menurut ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia dibandingkan dengan Hukum perlindungan Konsumen di Turki?;
3. Bagaimanakah **prosedur** penyelesaian ganti rugi terhadap *product liability* menurut ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia dibandingkan dengan Hukum perlindungan Konsumen di Turki?.

Metodologi

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian terhadap konsep-konsep yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dengan demikian, yang dipergunakan sebagai sumber datanya berupa data sekunder, baik yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tertier¹². Untuk menganalisis data dipergunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan mengadakan studi perbandingan hukum yang berorientasi pada pendekatan teori hukum. Pendekatan teori hukum dilakukan untuk memahami aspek hukum *product liability* menurut hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia dan Turki. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan metode dan penelitian hukum. Metode yang dipergunakan adalah membandingkan sistem hukum yang satu dengan yang lain, yang kurang lebih mempunyai kesamaan, sehingga ditemukan unsur-unsur yang sama, tetapi juga unsur-unsur yang berbeda.¹³ Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Sunaryati Hartono, yang mengatakan “metode perbandingan hukum adalah metode yang dipergunakan untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institution*) dari sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal.118.

¹³ R. Saerosa, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), hal. 6.

Dengan membanding-bandingkan itu akan ditemukan unsur-unsur persamaan sekaligus juga unsur perbedaan dari sistem hukum yang diperbandingkan tersebut”.¹⁴ Begitu juga dengan pendapat Henry Campbell Black, yang dimaksud dengan “comparative” adalah “*proceeding by the method of comparison, founded on comparison, estimated by comparison*”. Sedangkan “comparative jurisprudence” adalah “*the study of the principles of legal science by the comparison of various system of law*”.¹⁵ Oleh karena itu kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan perbandingan untuk mencari persamaan dan perbedaan diantara hukum perlindungan konsumen, khususnya yang berkaitan dengan *produk liability* di Indonesia dan Turki.

Adapun jenis penelitian ini bersifat *Descriptive Comparative Law*, yaitu dengan cara membandingkan sistem hukum perlindungan konsumen yang berkaitan dengan *product liability* yang diterapkan di Indonesia dengan sistem hukum perlindungan konsumen yang diterapkan di Turki. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan peraturan hukum mengenai *product liability* yang diatur dalam sistem hukum perlindungan konsumen yang ada di Indonesia dengan di Turki tanpa melakukan analisis. Namun demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk

menemukan persamaan maupun perbedaan dari sistem hukum perlindungan konsumen yang dipergunakan di kedua negara tersebut. Hal ini dilakukan berdasarkan persepsi bahwa setiap penelitian hukum selalu bertujuan untuk dapat memperoleh suatu ide-ide baru berupa konsep; doktrin; maupun bahan hukum yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan maupun penegakan hukum.¹⁶

Sumber data penelitian dapat berupa data primer maupun data sekunder, akan tetapi karena penelitian ini menggunakan obyek penelitian berupa peraturan perundang-undangan mengenai hukum *produk liability* di Indonesia dan Turki, maka data penelitian dalam penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder, yang meliputi :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu dari Indonesia adalah Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sedangkan dari Turki adalah *the Act No.4077 Consumer Protection as Amended by Act No.4822*;
2. Bahan hukum sekunder, dipergunakan untuk menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku; literatur, baik artikel maupun penelitian ilmiah yang relevan;
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang

¹⁴ Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta perbandingan Hukum* (Bandung, Citra Aditya, 1991), hal. 1.

¹⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, 1982), hal.28

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.¹⁷

Cara Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), melalui penelusuran kepustakaan di perpustakaan Fakultas Hukum Trisakti, perpustakaan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), perpustakaan di Kedutaan Besar Indonesia di Turki, serta penelusuran melalui internet. Dan seluruh data sekunder yang telah diperoleh mengenai tanggung jawab produsen terhadap produk (*product liability*), sistem tanggung jawab dan proses penyelesaian ganti rugi, diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih, karena penelitian ini tidak didasarkan pada populasi, sample dan tidak melakukan proses generalisasi, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sedangkan cara penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pola pikir secara deduktif, yaitu metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum, sehingga dari pemaparan sistem hukum yang terdapat dalam Hukum Perlindungan Konsumen, khususnya mengenai tanggung

jawab produsen terhadap produk (*product liability*), sistem tanggung jawab dan proses penyelesaian ganti rugi di kedua negara tersebut dapat diketahui persamaan ataupun perbedaannya. Metode ini dilakukan dengan persepsi bahwa analisis yang dilakukan merupakan proses ilmiah untuk memberikan gambaran atau pemahaman terhadap suatu aspek hukum dan atau dilakukan untuk membuat suatu konsep strategi dalam merealisasikan teori hukum tertentu secara praktis¹⁸, sehingga kajian dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses sistematisasi data, yang dilakukan dengan cara menyusun keseluruhan data yang telah diperoleh dan dikumpulkan melalui data yang telah disiapkan, untuk selanjutnya dilakukan deskriptif dalam bentuk uraian tertulis.¹⁹ Analisis data ini dilakukan melalui tahapan:

1. Keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dalam bentuk rangkuman atau abstrak hasil kajian hukum;
2. Data disusun dalam berbagai satuan kategorisasinya, sehingga dengan mudah dapat ditafsirkan makna maupun pengertian hukumnya; dan Hasil analisis data ditampilkan dalam bentuk deskriptif analitis.²⁰

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit.*, hal.32.

¹⁸ Ruslan Saleh, *Sekitar Teori Hukum*, Materi kuliah Teori Hukum, Program Pascasarjana (S2) bidang Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, 1995.

¹⁹ Lexy. L. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, 1989), hal.112.

²⁰ Schatzman & Strauss, *Field Research: Strategies for Natural Sociology* (New Jersey, 1973), hal.110.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Produsen terhadap *Product Liability* menurut Ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia dibandingkan dengan Hukum Perlindungan Konsumen di Turki

Tanggung jawab produsen terhadap produk timbul, karena adanya hubungan antara produsen dengan konsumen. Produsen dapat dikenakan pertanggung jawaban apabila barang-barang yang dibeli konsumen terdapat kerugian, produknya cacat dan berbahaya, dan bahaya terjadi tetapi tidak diketahui sebelumnya. Karena sebelum barang sampai kepada konsumen, produsen harus melakukan proses produksinya melalui beberapa tahap, diantaranya, tahap penyelidikan, perencanaan, pengelolaan, pengemasan dan pengepakan. Pada masing-masing tahap tersebut, produsenlah yang mengetahui persis apa yang telah dilakukannya. Jika kemudian produk yang dipasarkan itu menyebabkan kerugian bagi konsumen, maka produsen tidak boleh mengelak dari tanggung jawabnya. Indonesia maupun Turki telah mengatur tanggung jawab produk dalam undang-undang perlindungan konsumennya, yang terdapat dalam UUPK maupun *the Consumer Protection Act*.

1. Tanggung Jawab Produsen terhadap Produk (*Product Liabil-*

ity) menurut Ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

UUPK Indonesia telah mengatur secara detail tentang kewajiban-kewajiban dan perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, yang merupakan substansi dasar dari tanggung jawab produk pelaku usaha, kewajiban-kewajiban pelaku usaha diatur dalam 7 sampai dengan Pasal 11. Pasal 7 mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha, diantaranya adalah harus beritikad baik; memberikan informasi yang benar mengenai produk yang dihasilkan, melayani konsumen dengan jujur dan tidak diskriminatif serta memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian atas penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang yang diperdagangkan. Sedangkan Pasal 8 sampai dengan 11, mengatur mengenai larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam hal-hal yang menyangkut produk yang dihasilkan (Pasal 8), ketika menawarkan produk (Pasal 9) dan dalam konteks memperdagangkan barang, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar atas barang tersebut (Pasal 10) dan ketika barang tersebut dijual secara obral/

lelang (Pasal 11). Disamping itu pelaku usaha berhak untuk menerima pembayaran, mendapatkan perlindungan hukum, melakukan pembelaan diri, rehabilitasi nama baik, dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 6).

Hak-hak tersebut dapat dipergunakan apabila kewajiban-kewajiban pelaku usaha (Pasal 7 UUPK) sudah dilaksanakan dengan baik. Jika kewajiban-kewajiban tersebut belum dilaksanakan dengan baik, maka pelaku usaha tidak layak menerima hak tersebut, sebaliknya pelaku usaha tersebut justru harus berhadapan dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan kewajiban-kewajibannya sebagai pelaku usaha, dimana kewajiban pelaku usaha tersebut merupakan dasar hukum yang dipergunakan oleh konsumen untuk mempertahankan haknya yaitu menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 4.

Adapun tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19, 21, 23, 24, dan 25. Akan tetapi, pengaturan pasal-pasal tersebut, tidak dimasukkan dalam bab tersendiri yang khusus mengatur mengenai tanggung jawab produk, sehingga dapat dikatakan bahwa ketentuan yang terdapat pasal-pasal

tersebut bersifat umum, artinya berlaku tanggung jawab untuk semua pelaku usaha, jadi tidak ditujukan khusus kepada produsen terhadap produk yang cacat (*produk liability*).

Berdasarkan ketentuan Pasal-pasal yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha, maka ada beberapa hal yang perlu peneliti sampaikan, yaitu:

- a. Tanggung jawab produsen sebagai pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami oleh konsumen yang disebabkan oleh hal-hal yang ditentukan dalam UUPK. Sehingga, ada tidaknya cacat produk hanya menjadi penting dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan produsen yang menyebabkan kerugian konsumen²¹.
- b. Tidak diatur pengertian produsen, sebagai orang yang bertanggung jawab atas produk cacat. Yang diatur hanyalah pengertian mengenai pelaku usaha, yaitu "setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun

²¹ Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, (Surabaya, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2000), hal. 40.

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 butir (3))”;

- c. Tidak diatur mengenai pengertian produk, yang ada hanyalah pengertian mengenai barang, yaitu setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen (Pasal 1 butir (4)). Padahal pengertian produk lebih luas pengertiannya dibandingkan dengan barang. Menurut E. Saefullah, mengutip pendapat Jerry J Philips, dalam bukunya *Products Liability*²², produk secara umum diartikan sebagai barang yang secara nyata dapat dilihat dan dipegang (*tangible goods*), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Namun dalam kaitannya dengan masalah tanggung jawab produsen (*product liability*), produk bukan hanya berupa *tangible goods*, tetapi juga termasuk yang bersifat *intangible* seperti listrik, produk alami, misalnya

makanan hewan piaraan, tulisan misalnya, peta penerbangan yang diproduksi secara massal atau perlengkapan tetap pada rumah *real estate*. Termasuk dalam pengertian produk tersebut, tidak semata-mata produk yang sudah jadi secara keseluruhan, tetapi juga termasuk komponen dan suku cadang.

- d. Begitu juga dengan pengertian cacat tidak diatur, baik dalam Bab mengenai ketentuan umum yang memberikan pengertian berbagai istilah, maupun dalam bab-bab selanjutnya dan juga penjelasan Pasal yang berkaitan dengan barang yang cacat. Hal ini berarti, produk cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha, karena UUPK mengatur secara umum bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Tanggung Jawab Produsen terhadap Produk (*Product Liability*) menurut Ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen di Turki

²² E. Saefullah, *Tanggung Jawab Produsen (Product Liability) dalam Era Perdagangan Bebas*, op.cit, hal.44.

The Consumer Protection Turki, mengatur perlindungan konsumen untuk masalah kesehatan, keselamatan dan kepentingan ekonomi dalam hubungannya dengan barang-barang yang bersifat publik. Di Turki *product liability*, mengatur tanggung jawab pengusaha pabrik, grosir (*whole salers*), distributor dan vendor untuk lukanya orang atau properti yang disebabkan oleh produk berbahaya dan cacat produk cacat. Tujuan dari hukum *product liability* adalah untuk menolong konsumen dari produk berbahaya dan produk cacat. Sedangkan pengusaha pabrik, grosir (*whole salers*), grosir, distributor dan vendor bertanggung jawab untuk produknya yang berada di pasar, bahwa mereka mengetahui atau seharusnya telah mengetahui produknya berbahaya atau cacat.

Pengaturan mengenai tanggung jawab produk di Turki ini sama dengan di Indonesia, bersifat umum. Dalam Bab I, Pasal 2 the *Consumer Protection Act* diatur mengenai beberapa definisi yang terkait dengan *product liability*, yaitu definisi mengenai barang-barang (*goods*), konsumen (*consumer*), pihak pengusaha pabrik (*manufacturer-producer*), yaitu:

- a. **Goods**, diatur dalam Pasal 2 huruf c, yaitu:
“any movable property, immovable property used for dwelling or vacation purposes, and any software, or

other intangible audio or visual goods prepared for use in electronic medoum, subject to purchase or sale”.

- b. **Consumer**, diatur dalam Pasal 2 huruf e, yaitu:

“any natural or legal person who obtains, uses or benefits from goods or service for purposes outside his trade or profession”.

- c. **Manufacturer**, diatur dalam Pasal 2 huruf i, yaitu:

“the manufacturer, including public legal entities, of goods or services offered to the counsumer, or of the raw materials of such goods or services or semi-finished goods thereof, or any person offering such goods for sale by placing his name, trade mark or other distinctive sign on the counsumer goods.

Dalam Pasal 2 yang mengatur mengenai definisi-definisi, ternyata tidak diatur mengenai apa yang didefinisikan sebagai *Defect*.

Cacat dalam produk khususnya dalam hal keselamatan umumnya dibagi dalam 3 jenis²³, yaitu :

- a) *Production/Manufacturing Defect*;
Merujuk pada cacat yang terjadi dalam selama proses produksi atau kontruksi atau pemasangan produk.

²³ Ibid, hal.8-9

b) *Design Defect*

Merujuk pada cacat dalam keseluruhan menjalankan produk. Hal ini dapat disebabkan oleh pemilihan materi yang kurang hati-hati, produk formula, bahan-bahan atau spesifikasi atau kegagalan dalam memasukkan segi-segi keselamatan yang cukup. Jenis cacat ini umumnya dapat ditemukan pada produk *high-tech* (berteknologi tinggi) seperti bahan kimia (*chemical*), kendaraan (*vehicles*), obat-obatan (*drugs*) dan kesehatan (*medicine*).

c) *Marketing Defect*

Cacat pemasaran terjadi ketika produk yang didisain dan yang diberi label tidak diberi peringatan atau petunjuk penggunaan (instruksi). Peringatan dan instruksi merupakan suatu unsur penting dalam menentukan keseluruhan keselamatan produk. Tanggung jawab untuk jenis cacat ini terjadi jika secara langsung pembuat gagal, dalam menentukan informasi yang cukup tentang *hazard* atau risiko dalam menggunakan produk.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan mengenai tanggung jawab produk, dapat diketahui berdasarkan pengertian-pengertian yang terdapat dalam Bab I *the Consumer Protection Act*, Bentuk tanggung jawab produsen tersebut adalah berupa kerugian, baik kerugian yang menyebabkan kematian, lukanya orang

maupun harta benda.

B. Sistem Tanggung Jawab Product Liability menurut Ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia dibandingkan dengan Hukum Perlindungan Konsumen di Turki

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa dalam dunia bisnis saat ini, suatu produk untuk sampai kepada konsumen biasanya melalui berbagai jalur perantara, seperti agen, grosir, distributor, dan pedagang eceran. Sedangkan untuk produknya, khusus untuk produk-produk yang jumlahnya besar diproses melalui proses industri. Akibat dari proses industri dalam proses produksi, timbul masalah hukum sehubungan dengan adanya barang-barang yang cacat dalam yang dapat merugikan konsumen. Permasalahannya adalah dalam rangka tuntutan konsumen akibat produk yang cacat (*defect product*) tersebut.

Berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku umum, konsumen yang menderita kerugian akibat produk atau barang yang cacat dapat menuntut pihak produsen secara langsung, atau menuntut pihak pedagang dari mana barang tersebut dibeli. Tuntutan diajukan berdasarkan telah terjadinya perbuatan melawan hukum (*tort*) atau didasarkan pada *based on fault system*, seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUPerdata dan bukan atas dasar wanprestasi (*presumption of liability sys-*

tem), karena jika tuntutan didasarkan atas wanprestasi, maka terlebih dahulu antara produsen dan konsumen terikat suatu perjanjian, dengan demikian pihak ketiga bukan sebagai pihak dalam perjanjian, sehingga tidak dapat menuntut ganti kerugian.

Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi tersebut, merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian, sehingga membawa akibat pihak yang merugikan harus mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Kewajiban untuk membayar ganti rugi ini tidak lain dari akibat penerapan klausula dalam perjanjian, yang oleh kedua belah pihak telah secara sukarela tunduk pada perjanjiannya. Jadi bukan undang-undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti kerugiannya atau berapa besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, dan apa yang telah diperjanjikan tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata). Sedangkan Tuntutan ganti kerugian berdasarkan atas perbuatan melawan hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap orang yang merasa dirugikan, tanpa perlu adanya perjanjian sebelumnya. Dengan demikian, pihak ketiga atau pihak yang dirugikan dapat menuntut atas dasar perbuatan melawan hukum. Untuk dapat menuntut ganti kerugian, harus dipenuhi unsur-unsur adanya

perbuatan melawan hukum; adanya kerugian; ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian dan adanya kesalahan. Akan tetapi jika konsumen yang menderita kerugian, akan menuntut pihak produsen atas dasar perbuatan melawan hukum, maka konsumen tersebut akan menghadapi berbagai kendala, yang akan mempersulit memperoleh kompensasi atau ganti rugi, karena pihak konsumen sebagai pihak yang dirugikan harus membuktikan adanya unsur kesalahan dari produsen. Selain itu tuntutan harus dilakukan melalui pengadilan, yang umumnya memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Oleh karena itu, Amerika Serikat sejak tahun 1960 dan negara-negara maju lainnya seperti Inggris dan Kanada telah memberlakukan sistem tanggung jawab mutlak (*strict liability system*), sehingga setiap konsumen yang merasa dirugikan atas produk barang yang cacat dapat menuntut kompensasi, tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan dipihak produsen. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemberian kompensasi bagi konsumen yang menderita kerugian akibat produk cacat yang diedarkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka menjadi penting adalah hukum yang berlaku di negara Indonesia dan Turki, dimana kerugian itu terjadi, apakah cukup melindungi konsumen atau tidak. Dan untuk itu tergantung pada prinsip tanggung jawab

yang dianut di kedua negara yang bersangkutan, apakah prinsip tanggung jawab berdasarkan atas kesalahan (*based on fault/tort of negligence*), atau prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

1. Sistem Tanggung Jawab *Product Liability* menurut Ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

Sebagaimana telah diketahui, bahwa pengaturan tanggung jawab pelaku usaha dalam UUPK diatur dalam Pasal 19, 21, 23, 24, dan 25. Jika tanggung jawab pelaku usaha tersebut tidak dilaksanakan, maka konsumen dapat menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan, sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1). Hal ini berarti tanggung jawab produsen meliputi segala kerugian yang dialami oleh konsumen yang disebabkan oleh hal-hal yang ditentukan dalam UUPK.

Untuk dapat menuntut ganti rugi diperlukan pembuktian terlebih dahulu dan menurut ketentuan 19 ayat (5): "ketentuan sebagaimana ditentukan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen". Penjelasan Pasalnya menyebutkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem pembuktian terbalik.

Ketentuan Pasal 19 ayat (5) ini, dalam persepektif hukum pembuktian, menerapkan sistem *based on fault* dengan beban pembuktian terbalik, dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 jo Pasal 1865 KUHPerdata, dimana sistem pembuktian yang terdapat dalam Pasal 1365 jo Pasal 1865 KUPerdata adalah konsumen diwajibkan untuk membuktikan²⁴. Dalam sistem pembuktian yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (5), yang diwajibkan membuktikan adanya unsur kesalahan adalah pelaku usaha atau produsen itu sendiri. Sistem beban pembuktian terbalik ini diperkuat oleh Pasal 22 dan Pasal 28 UUPK.

Dalam hal ini, selama pelaku usaha tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut bukan merupakan kesalahan yang terletak pada pihaknya, maka demi hukum pelaku usaha bertanggung jawab, dan wajib mengganti kerugian yang diderita tersebut. Meskipun UUPK mengatur beban pembuktian mengenai kesalahan kepada pelaku usaha, hal ini memberikan konsekuensi hukum, bahwa pelaku usaha yang dapat membuktikan kerugian bukan merupakan kesalahannya terbebas dari tanggung jawabnya mengganti kerugian. Berhasil atau tidaknya pelaku usaha membuktikan salah atau tidaknya atas kerugian konsumen, sangat menentukan bebas tidaknya pelaku usaha dari tanggung jawabnya untuk membayar ganti kerugian.

²⁴ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hal. 68-69.

Dengan demikian, berdasarkan *system based on fault* dengan beban pembuktian terbalik tersebut kedua pihak terlindungi, karena sistem ini memberikan beban kepada masing-masing pihak secara proposional, yaitu konsumen hanya membuktikan adanya kerugian yang dialami, karena/akibat mengkonsumsi produk tertentu yang berasal dari produsen, sedangkan pembuktian ada atau tidaknya kesalahan pihak pelaku usaha yang menyebabkan kerugian pada konsumen dibebankan kepada produsen²⁵. Pembalikan beban pembuktian merupakan salah satu bentuk pemberdayaan konsumen yang diatur dalam UUPK dan merupakan ketentuan beban pembuktian yang bersifat khusus sebagai penyimpangan atas ketentuan umum dari sistem *based on fault* yang diatur dalam Pasal 1365 dan 1865 KUPerdata.

Adapun bentuk ganti rugi yang diberikan oleh undang-undang dalam Pasal 19 ayat (2) kepada konsumen adalah dapat berupa: pengembalian uang atau; penggantian barang dan/jasa yang sejenis atau setara nilainya; Perawatan kesehatan dan/atau; pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3).

Pengertian kerugian itu sendiri menurut Niewenhuis adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma orang lain²⁶. Kerugian yang diderita seseorang dapat berupa kerugian yang menimpa harta benda maupun jiwa seseorang. Dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang dirugikan ditempatkan dalam kedudukan yang seharusnya, andaikata perjanjian dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi perbuatan melanggar hukum.

Dengan demikian ganti kerugian harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur yang tidak terkait langsung dengan kerugian, seperti kemampuan/kekayaan pihak yang dirugikan²⁷. Untuk cara perhitungan besarnya ganti kerugian, Bloembergen menyatakan bahwa "kalau kita bicara tentang kerugian, maka dapat dipikirkan suatu pengertian yang konkrit, yaitu kerugian adalah kerugian nyata yang diderita oleh orang yang dirugikan"²⁸.

Jika dikaitkan dengan toeri Blombergen tersebut, maka Pasal 19 ayat (2) UUPK, walaupun tidak menentukan secara pasti berapa besarnya ganti kerugian

²⁵ Ahmad Miru, *op.cit*, hal. 169.

²⁶ Niewenhuis, *Pokok-pokok Perikatan*, terjemahan Djasadin Saragih (Surabaya, Universitas Airlangga, 1985), hal. 57.

²⁷ Ahmad Miru, *op.cit*, hal. 134.

²⁸ *Ibid*.

yang akan menjadi tanggung jawabnya (*limitation of liability*), telah menentukan jenis ganti kerugian berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai ganti kerugian yang bersifat konkrit.

Penerapan *system based on fault* dengan beban pembuktian terbalik terhadap pelaku usaha selaku produsen dalam UUPK ini ternyata masih terdapat hal-hal yang dapat membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawabnya, baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian, yaitu apabila pelaku usaha berhasil membuktikan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2): "Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen, apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut". Dan Pasal 27: "Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawabnya atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya

ketentuan mengenai kualifikasi barang, yaitu ketentuan standarisasi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak;

- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan, sebagai masa garansi".

2. Sistem Tanggung Jawab *Product Liability* menurut Ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen di Turki

Turki sama seperti Indonesia, sudah mempunyai Undang-undang Perlindungan Konsumen yang dikenal dengan *The Consumer Protection Act (the CPA)*, yang bertujuan untuk memberikan hak-hak perlindungan yang lebih besar kepada konsumen.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *The CPA* tersebut, sistem tanggung jawab produk yang dapat diterapkan di Turki, dalam hubungannya terhadap lukanya orang atau kerugian terhadap harta bendanya yang diakibatkan oleh supply barang yang ditemukan cacat, apakah menerapkan sistem tanggung jawab berdasarkan atas kesalahan, ataukah *strict liability* atau keduanya atau tanggung jawab atas dasar kontrak juga dapat diterapkan?. Maka jawabnya adalah tidak ada sistem yang khusus, yang sepakat dengan klaim

dalam tanggung jawab produk, karena klaim atas tanggung jawab produk dapat dilakukan berdasarkan *the CPA*, dan *The law of Torts*

Jadi saat ini di Turki, klaim untuk produk cacat menggunakan 3 (tiga) ketentuan yang berbeda untuk tanggung jawab produk yaitu :

- a. Tanggung jawab produk berdasarkan ketentuan dalam *the CPA*
- b. Tanggung jawab produk atas dasar perbuatan melawan hukum (*tort of negligence*); dan
- c. Tanggung jawab produk atas dasar perjanjian (*contract of liability*).

Akan tetapi, sayang sekali dalam *the CPA* tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai batas minimal atau maksimal besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh produsen kepada konsumen.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa sistem tanggung jawab yang diterapkan dalam *the CPA* Turki, adalah system tanggung jawab berdasarkan atas kesalahan ditujukan terhadap kerugian yang menyebabkan kematian, atau lukanya orang atau setiap kehilangan atau kerugian harta benda, yang diakibatkan cacat dalam produk.

C. Prosedur Penyelesaian Ganti Rugi terhadap *Product Liability* menurut Ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen di Indo-

nesia dibandingkan dengan Hukum Perlindungan Konsumen di Turki

Ketentuan tentang beban pembuktian sebagaimana ditegaskan dalam pokok permasalahan kedua mengenai sistem tanggung jawab, dalam hukum acara perdata merupakan bagian yang penting dan menentukan dapat atau tidaknya suatu tuntutan atau gugatan perdata dikabulkan, karena pembebanan pembuktian yang salah oleh hakim dapat mengakibatkan seseorang yang seharusnya memenangkan perkara menjadi pihak yang kalah, hanya karena tidak mampu membuktikan sesuatu sebenarnya menjadi haknya. Sebagai dasar pembebanan pembuktian dalam hukum acara perdata di Indonesia, berlaku asas umum beban pembuktian yang terdapat dalam Pasal 163 HIR/283 Rbg/1865 KUPerdata, yang menentukan bahwa: "barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu". sedangkan di Turki menggunakan *The Law of the Torts*. Apabila asas umum beban pembuktian tersebut diterapkan dalam kasus-kasus kerugian konsumen akibat penggunaan produk, maka berarti baik produsen maupun konsumen dibebani pembuktian. Sedangkan dalam hukum tentang *product liability* pihak korban atau konsumen yang akan menuntut ganti

kerugian, pada dasarnya hanya diharuskan menunjukkan 3 hal, yaitu:

- a. Produk tersebut memang telah cacat pada waktu diserahkan oleh produsen;
- b. Cacat tersebut telah menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian atau kecelakaan;
- c. Adanya kerugian. Akan tetapi, juga diakui secara umum bahwa pihak korban atau konsumen harus menunjukkan bahwa pada waktu terjadinya kerugian, produk tersebut pada prinsipnya berada dalam keadaan seperti waktu diserahkan oleh produsen, artinya tidak diadakan modifikasi-modifikasi oleh konsumen.

1. Prosedur Penyelesaian Ganti Rugi terhadap *Product Liability* menurut Ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

Masalah penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha sendiri dalam UUPK Indonesia diatur Bab X yang terdiri dari 4 Pasal, yaitu Pasal 45 sampai dengan Pasal 48. Dalam Pasal 45 diatur mengenai adanya dua pilihan penyelesaian sengketa, baik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum, yaitu:

- (1) "Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat

pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada dilingkungan pengadilan umum.

- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa".

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua pihak yang bersengketa, tanpa melalui pengadilan atau BPSK.

- a. Penyelesaian Sengketa melalui BPSK

Pengaturan mengenai BPSK sendiri terdapat dalam Bab XI, dari Pasal 49 sampai Pasal 58. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui BPSK bukanlah suatu keharusan untuk ditempuh konsumen, sebelum pada akhirnya sengketa tersebut diselesaikan melalui lembaga pengadilan. Walaupun demikian, hasil putusan BPSK memiliki kekuatan hukum yang dapat memberikan *shock therapy* bagi pelaku

usaha yang melanggar, karena putusan BPSK dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidik. Hal ini berarti penyelesaian sengketa melalui BPSK, tidak menghilangkan tanggung jawab pidana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku²⁹.

UUPK memberikan kewenangan kepada BPSK menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 60. Putusan yang dijatuhkan oleh BPSK, penetapan atau pelaksanaan eksekusinya harus meminta keputusan dari Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan sesuai ketentuan Pasal 57. Selain itu, UUPK juga membedakan jenis gugatan yang dapat diajukan BPSK berdasarkan *persona standi in judicio*. Rumusan Pasal 46 ayat (1) menentukan "Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

- 1) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya;
- 2) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;

UUPK ini mengakui gugatan kelompok konsumen yang dikenal dengan istilah *class action*. *Class action* adalah suatu

prosedur hukum yang memungkinkan banyak orang bergabung untuk menuntut ganti kerugian atau kompensasi lainnya didalam suatu gugatan³⁰. *Class action* ini menurut penjelasan pasalnya, harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.

- 3) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
- 4) Pemerintah atau instansi terkait, apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh konsumen mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit". Putusan BPSK bersifat "final dan mengikat" tidak bersifat mutlak, karena masih dimungkinkan untuk melakukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri. Sekalipun proses penyelesaian ganti rugi tersebut melalui tiga tahap, yaitu melalui BPSK, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, namun UUPK telah memberikan jangka waktu yang pasti bagi penyelesaian perselisihan konsumen. Waktu penyelesaian

²⁹ Gunawan Wijaya, *op.cit.*, hal. 73.

³⁰ Ahmad Miru, *op.cit.*, hal. 231.

dibatasi yaitu maksimum 100 (seratus) hari untuk semua tahap sampai mencapai putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tujuan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan adalah agar tercapai kesepakatan untuk menjamin tidak terjadi atau tidak terulang lagi kerugian pada konsumen (Pasal 47). Adapun bentuk dan besarnya ganti kerugian tidak ditentukan secara pasti, akan tetapi didasarkan pada kesepakatan.

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan diatur dalam Pasal 48, yang menentukan: "Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45". Khususnya ayat (4), yang artinya, para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (4) para pihak masih dimungkinkan untuk mengajukan

gugatan melalui pengadilan walaupun telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, hanya jika berdasarkan upaya penyelesaian tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak. Adapun cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan menggunakan hukum acara yang berlaku selama ini yaitu *HIR/Rbg*.

UUPK dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 UUPK. Dan pemerintah juga mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 41. Tujuannya agar dapat lebih memberdayakan konsumen dalam menuntut hak-haknya dengan tanpa mengabaikan kepentingan pelaku usaha.

2. Prosedur Penyelesaian Ganti Rugi terhadap *Product Liability* menurut Ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen di Turki

Dalam *the CPA* alternatif pilihan penyelesaian sengketa ganti rugi antara produsen dengan konsumen dapat dilakukan melalui Pengadilan atau *The Arbitration Committee*.

1. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Penyelesaian sengketa antar konsumen dengan pelaku usaha dalam *the CPA* diatur dalam Bab III mengatur mengenai *Consumer Councils* dalam Pasal 21 dan Pasal 22 mengatur alternatif jenis mekanisme penyelesaian ganti rugi yang disebut dengan *The Arbitration Committee* yang objek utamanya adalah mempromosikan dan melindungi hak-hak konsumen, untuk memperoleh ganti rugi dengan cara yang mudah, cepat dan murah terhadap keluhan konsumen.

Dengan demikian, sama seperti UUPK, dalam *the CPA* juga diatur pembentukan lembaga atau badan yang bertujuan untuk dapat lebih memberdayakan konsumen dalam menuntut hak-haknya dengan tanpa mengabaikan kepentingan pelaku usaha, yaitu yang disebut dengan *The Consumer Council*, yang diatur dalam Bab III *the CPA*.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan dan berpedoman pada tujuan penelitian, serta analisis terhadap hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat

disampaikan suatu kesimpulan bahwa terdapat persamaan maupun perbedaan mengenai tanggung jawab produsen terhadap produk yang cacat, system tanggung jawab yang dipergunakan serta penyelesaian ganti rugi pada hukum *product liability* baik di Indonesia maupun di Turki, yaitu:

1. Terdapat perbedaan dan persamaan mengenai tanggung jawab pelaku usaha antara UUPK Indonesia dengan *the Consumer Protection Act Turki*, yaitu:

a. Perbedaan

Dalam UUPK memang tanggung jawab pelaku usaha diatur secara khusus dalam Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, akan tetapi mengenai tanggung jawab produsen atas produk (*product liability*) tidak diatur secara khusus dalam bab tersendiri. Tanggung jawab pelaku usaha dalam Bab VI, bersifat umum, artinya berlaku tanggung jawab untuk semua pelaku usaha, jadi tidak khusus ditujukan terhadap tanggung jawab produsen terhadap produk yang cacat. Sedangkan di Turki tidak hanya diatur secara khusus dalam *the CPA* tetapi juga diatur dalam *The law of Torts*, ditujukan kepada produsen

terhadap produk cacat baik cacat produk, cacat disain maupun cacat peringatan.

b. Persamaan

- 1) Baik UUPK maupun *The Consumer Protection Act* sama-sama mengatur tanggung jawab produk terhadap setiap kerugian yang diderita konsumen, adalah kerugian dalam pengertian kematian, lukanya orang atau setiap kehilangan atau kerugian terhadap setiap harta kekayaan;
 - 2) Baik UUPK maupun *The CPA* sama-sama tidak menentukan besarnya jumlah ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha atau produsen (*limitation of liability*). Jadi kedua undang-undang tersebut tidak mengatur jumlah minimal dan jumlah maksimal yang harus diterima oleh konsumen.
2. Terdapat perbedaan sistem tanggung jawab yang diterapkan terhadap barang atau *product liability*. Dalam UUPK diterapkan sistem tanggung jawab *based on fault* dengan beban pembuktian terbalik untuk semua kerugian konsumen, sedangkan dalam *The Consumer Protection Act* diterapkan sistem tanggung jawab *based on fault*, khusus hanya untuk produk yang cacat dan kekurangan dalam memberikan pelayanan.
3. Terdapat perbedaan dan persamaan dalam proses penyelesaian ganti rugi yang dilakukan oleh konsumen terhadap produsen menurut UUPK dan *The Consumer Protection Act*, yaitu:
- a. Perbedaan
- 1) Dalam UUPK, proses penyelesaian ganti rugi dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Di luar pengadilan diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sedangkan dalam *the Consumer Protection Act*, proses penyelesaian dilakukan melalui pengadilan tetapi juga melalui arbitrase yang dikenal dengan *Arbitration Committee*.
 - 2) Indonesia diatur mengenai gugatan secara *class action*, sedangkan di Turki tidak diatur.

b. Persamaan

Mempunyai badan atau lembaga yang tugasnya memberdayakan hak-hak konsumen. Di Indonesia disebut dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat (LKSM) yang dibentuk oleh masyarakat yang diakui oleh pemerintah, sedangkan di Turki disebut dengan *The Consumer Council*;

B. Saran

Walaupun sifat penelitian ini hanya deskriptif analitis yang bersifat comparative, yaitu hanya membandingkan *produk liability* di Indonesia dengan Turki, namun untuk perbaikan atau penyempurnaan hukum *produk liability* di Indonesia, perlu kiranya peneliti memberikan saran kepada pemerintah, bahwa Indonesia sudah saatnya membuat undang-undang yang khusus mengatur mengenai hukum tanggung jawab produk (*product liability law*) yang terpisah dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen, agar produsen dapat bertindak hati-hati dalam memproduksi barang ataupun jasa;

(HJ - EP)

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2000.
- AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Diadit Media, 2001.
- Billy, Law Nafiah, *Small Claim*, Singapura, Longman Singapura Publishers, 1994.
- D.L. Dann, *Strict Liability in the U.S.A.*, dalam *Aviation Products Liability Symposium*, The Royal Aeronautical Society, London, 1972.
- E. Saefullah Wiradipradja, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Perundang-undangan Nasional, Khususnya dibidang Angkutan Udara*, Bandung, 1991.
- . *Product Liability, Tanggung Jawab Produsen di Era Perdagangan Bebas*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.5, Jakarta: 1998.
- . *Tanggung Jawab Produsen terhadap Akibat Hukum yang ditimbulkan pada Era Pasar Bebas*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- E. Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.

- Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing Co, 1979.
- Imran, Naring. *Perlindungan Konsumen dan Product Liability*, Solusi hukum.com, 8 Oktober 2008.
- Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.
- International Comparative Legal Guides (ICLG), *Product Liability India*. <http://www.iclg.co.uk>.
- Johannes Gunawan, makalah seminar tentang *Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, diselenggarakan oleh PT Astra Internasional Tbk Jakarta, 8 Juli 1999.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, 1989.
- M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta, 1979.
- Mieke Komar Kantaatmadja, *Tanggung Jawab dalam Pencemaran Udara*, Bandung, 1978.
- Niewenhuis, Pokok-pokok Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya: Univeristas Airlangga, 1985.
- Norman K Denzin & Yvonna S. Lincoln, ed. *Handbook of Qualitative Research*. London: 1994.
- Ruslan Saleh. *Sekitar Teori Hukum*, Materi Kuliah Teori Hukum, Program Pascasarjana (S2) bidang Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, 1995.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Schatzman & Strauss. *Field Research: Strategies for Natural Sociology*. New Jersey: 1973.
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2000.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: 1982.
- Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung, Citra Aditya, 1991.
- Tini Hadad, dalam AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Diadit Media, 2001.
- Turki. The Act No.4077 on *Consumer Protection Act as Amended by Act No. 4077*.
- Wade, *On the Nature of Strict Tort Liability for Product*, Miss Lj 825 at 826, 1973.
- Winardi. *Kamus Manajemen Ekonomi Perdagangan*. Bandung: Transito, 1982.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung, 1976.